



# Pemprov DKI

## Dua Versi APBD Jadi Polemik

**P**EMERINTAH Provinsi DKI Jakarta kembali berhadapan dengan anggota DPRD DKI. Kali ini konflik antara pihak eksekutif dan legislatif itu disebabkan oleh sikap saling menyalahkan dalam mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang sudah disahkan dan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah DKI Saefulah saat ini masih mendalami dan menemukan perbedaan yang ada antara APBD yang dikirim eksekutif dan APBD yang dikirim oleh legislatif. "Masih dicari-cari dan digarisbawahi yang ada," kata Saefulah di Balai Kota DKI, kemarin.

Proses pengesahan APBD telah dilakukan. Tahap selanjutnya yang harus ditempuh ialah mengirimkan berkas APBD ke Kemendagri untuk dievaluasi dan dikembalikan kepada pemprov untuk dilihat catatan evaluasi dari Kemendagri.

Saat ini, pemprov dan DPRD sama-sama mengirim berkas APBD DKI tahun anggaran 2015, tetapi dengan versi yang berbeda.

Karena itu, DPRD ingin mengajukan hak angket untuk menyelidiki APBD 2015 yang dikirim pihak eksekutif ke Kemendagri.

Ketua Fraksi PDIP yang juga menjadi Ketua Hak Angket, Jhonny Simanjutak, menyatakan harus ada hak angket untuk membuktikan tidak semua yang dilakukan oleh eksekutif benar.

"Pertimbangan kita pakai hak angket karena tindakan gubernur itu sudah kasat mata dan

faktual. Tidak selamanya gubernur selalu benar dan DPRD selalu salah," kata Jhonny.

### Ingin interpelasi

Sementara itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok justru ingin dirinya diinterpelasi oleh anggota dewan. Menurutnya, hak tanya atau hak interpelasi bisa lebih memudahkan dirinya dalam menjawab semua keraguan anggota dewan dalam penyusunan APBD 2015. Karena itu, ia pun meminta DPRD mengajukan hak interpelasi. "Saya bilang, kalau hak interpelasi, lebih bagus kan. Jadi saya bisa jawab," kata Ahok.

Sebelumnya, DPRD DKI mengancam akan menggunakan hak interpelasi untuk mendengar pengakuan Ahok terkait rendahnya serapan APBD DKI. Ahok balik mengancam membongkar pajak dan gaya hidup anggota dewan serta anggota DPRD yang melobi untuk memasukkan anggaran Rp8,8 triliun untuk kegiatan fiktif. (Put/J-1)